

Policy Coherence Dalam Implementasi E-Government Di Indonesia: Sinkronisasi Kebijakan Pusat Dan Daerah

Sidik Firmadi (1), Budi Nugraha (2)

Universitas Siliwangi, (0265) 330634. No Hp. 0852 6920 9966

Email Korespondensi: sidikfirmadi@unsil.ac.id

Abstrak: Penelitian ini menganalisis tingkat kematangan penerapan e-government di pemerintah daerah Indonesia dengan menekankan dimensi policy coherence antara pusat–daerah. Kajian dilakukan melalui systematic literature review dengan kerangka evaluasi SPBE serta data United Nations E-Government Development Index (EGDI) periode 2018–2024. Hasil menunjukkan adanya peningkatan skor SPBE nasional (2,34 pada 2022 menjadi 2,79 pada 2023) dan kenaikan peringkat EGDI Indonesia (107 pada 2018 menjadi 64 pada 2024). Namun, disparitas capaian antardaerah masih besar. Analisis mengungkap bahwa konsistensi regulasi, kepemimpinan lokal, literasi digital aparatur, dan infrastruktur TIK merupakan faktor pembeda utama. Studi ini menawarkan kontribusi teoritis dengan menautkan model kematangan e-gov pada kerangka policy coherence vertikal–horizontal, sekaligus rekomendasi strategis berupa roadmap sinkronisasi kebijakan pusat–daerah untuk mempercepat transformasi digital menuju SPBE “Sangat Baik”.

Kata kunci; Policy Coherence; Implementasi; Sinkronisasi Kebijakan; dan SPBE.

Abstract: This study analyzes the maturity level of the implementation of e-government in Indonesian local governments by emphasizing the dimension of policy coherence between the central and regional governments. The study was conducted through a systematic literature review with the SPBE evaluation framework and United Nations E-Government Development Index (EGDI) data for the 2018–2024 period. The results show an increase in the national SPBE score (2.34 in 2022 to 2.79 in 2023) and an increase in Indonesia's EGDI rating (107 in 2018 to 64 in 2024). However, the disparity in achievement between regions is still large. The analysis revealed that regulatory consistency, local leadership, digital literacy of the apparatus, and ICT infrastructure are the main differentiating factors. This study offers a theoretical contribution by linking the e-gov maturity model to a vertical-horizontal policy coherence framework, as well as a strategic recommendation in the form of a roadmap for central-regional policy synchronization to accelerate digital transformation towards "Excellent" SPBE.

Keywords: Policy coherence; Implementation; E-Government; Synchronization Policy, and SPBE.

Article History :

Received 28-07-2025; Revised 13-08-2025; Accepted 08-09-2025

PENDAHULUAN

Transformasi digital melalui *electronic government (e-government)* merupakan agenda global dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, partisipatif, dan akuntabel (Indrajit et al., 2004). Model kematangan e-government menegaskan bahwa keberhasilan transformasi tidak hanya ditentukan oleh aplikasi, tetapi juga perubahan proses birokrasi dan penciptaan nilai public (Chohan et al., 2020a). Tren ini menunjukkan bahwa faktor kelembagaan, *interoperabilitas*, dan partisipasi warga menjadi kunci keberhasilan (Valdés et al., 2011). Namun, konteks Indonesia memperlihatkan dinamika berbeda, dengan disparitas antardaerah yang belum terurai sepenuhnya melalui kerangka SPBE.

Di Indonesia, *e-government* telah diprioritaskan dalam agenda reformasi birokrasi melalui regulasi strategis seperti Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE dan Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur SPBE. Namun, capaian antar daerah menunjukkan disparitas tinggi (KemenPANRB, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa regulasi nasional belum sepenuhnya terinternalisasi di daerah.

Kesenjangan implementasi mengindikasikan pentingnya melihat isu sinkronisasi kebijakan pusat–daerah (*policy coherence*). Literatur internasional menegaskan bahwa *policy coherence* diperlukan untuk mengatasi fragmentasi kebijakan dan memastikan konsistensi dalam jangka panjang (Valdés et al., 2011). Di Indonesia, fragmentasi kebijakan *e-government* tercermin pada perbedaan kapasitas infrastruktur, sumber daya manusia, serta lemahnya koordinasi antar-OPD (Suci Pratiwi, 2020). Melalui *e-government*, pemerintah daerah dapat mengintegrasikan teknologi digital untuk mempermudah akses layanan, mempercepat birokrasi, serta memperbaiki sistem administrasi (Nugraha et al., 2021).

Indeks *E-Government Development Index* (EGDI) yang dirilis PBB menunjukkan peningkatan signifikan Indonesia dari peringkat 107 pada 2018 menjadi 64 pada 2024, menandakan adanya kemajuan dalam pelayanan publik berbasis digital (Chohan et al., 2020b). Meskipun demikian, perkembangan tersebut belum sepenuhnya tercermin di tingkat lokal. Implementasi *e-government* di pemerintah daerah masih menghadapi kesenjangan, baik dari sisi infrastruktur, kapasitas SDM, maupun integrasi layanan. (Nugroho & Purbokusumo, 2020)

Sebagai instrumen nasional, *Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik* (SPBE) digunakan untuk mengukur kematangan penerapan *e-government* melalui empat domain: kebijakan, tata kelola, manajemen, dan layanan (KemenPANRB, 2023). Skor nasional meningkat dari kategori ‘cukup’ (2,34 pada 2022) menjadi ‘baik’ (2,79 pada 2023), tetapi terdapat disparitas tajam antar daerah: Provinsi Bali mampu mencapai kategori tinggi, sementara sebagian besar kabupaten/kota masih berada pada level rendah (KemenPANRB, 2023). Lebih jauh, berdasarkan survei *United Nations E-Government Development Index* (EGDI), Indonesia menempati peringkat ke-77 dari 193 negara pada tahun 2022, meningkat dari posisi ke-88 pada tahun 2020. (of Economic & Affairs, 2024)

Kesenjangan ini mengindikasikan bahwa transformasi digital di tingkat lokal belum berjalan optimal. Perbedaan kapasitas infrastruktur, sumber daya manusia, dan dukungan regulasi menjadi faktor utama yang menentukan keberhasilan maupun keterlambatan implementasi (Sari & Winarno, 2012). Selain itu, keterbatasan pengawasan, sarana prasarana yang belum memadai, lemahnya koordinasi antarunit kerja, serta belum optimalnya internalisasi norma dalam pelaksanaan kebijakan turut menjadi kendala dalam membangun *smart governance* secara menyeluruh. (Nugraha, n.d.)

Meskipun literatur mengenai implementasi *e-government* di Indonesia relatif banyak, sebagian besar studi lebih menekankan pada aspek teknis kesiapan infrastruktur dan kapasitas SDM (Nugroho & Purbokusumo, 2020). Belum banyak penelitian yang secara khusus menelaah dimensi *policy coherence* antara pusat dan daerah sebagai faktor penentu variasi capaian SPBE.

Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan analisis pada sejauh mana *policy coherence* antara pusat–daerah dapat menjelaskan variasi kematangan SPBE di tingkat lokal. Tujuan penelitian ini adalah: (1) menganalisis capaian dan tren SPBE pemerintah daerah di Indonesia, (2) *Policy Coherence* dalam Implementasi E-Government di Daerah, dan (3) merumuskan rekomendasi strategis berbasis sinkronisasi kebijakan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *systematic literature review* (SLR). Literatur yang dianalisis meliputi artikel jurnal, laporan resmi pemerintah, serta dokumen evaluasi SPBE periode 2018–2023. Sumber utama mencakup laporan *E-Government Development Index* (EGDI) Perserikatan Bangsa-Bangsa, laporan evaluasi SPBE Kementerian PANRB, serta studi empiris terkait implementasi *e-government* di tingkat lokal.

Proses telaah literatur dilakukan melalui tiga tahap. Pertama, **identifikasi sumber** dengan menyeleksi publikasi nasional maupun internasional yang relevan menggunakan database Google Scholar, Scopus, dan portal resmi pemerintah. Kedua, **kategorisasi tematik** berdasarkan kerangka evaluasi SPBE (domain kebijakan, tata kelola, manajemen, dan layanan) serta faktor-faktor pendukung

dan penghambat implementasi. Ketiga, **analisis sintesis**, yaitu mengintegrasikan temuan dari berbagai literatur untuk memperoleh pola umum, kesenjangan, dan rekomendasi strategis. (Sugiyono, 2012)

Untuk memperkuat analisis, penelitian ini juga memanfaatkan **data longitudinal EGDI Indonesia (2018–2023)** dan tren capaian Indeks SPBE Nasional (2022–2023). Pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai tingkat kematangan e-government, baik pada skala global maupun nasional-lokal. (Creswell & Poth, 2018)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tingkat Kematangan Implementasi E-Government

Hasil evaluasi SPBE menunjukkan adanya peningkatan capaian nasional dari skor 2,34 pada tahun 2022 menjadi 2,79 pada tahun 2023, yang berarti bergeser dari kategori *cukup* ke *baik* (KemenPANRB, 2023). Peningkatan ini sejalan dengan tren global, di mana posisi Indonesia dalam *United Nations E-Government Development Index* (EGDI) juga naik signifikan dari peringkat 107 pada 2018 menjadi 64 pada 2024 (United Nations, 2024). Data longitudinal tersebut mengindikasikan adanya perbaikan tata kelola digital secara nasional. (I Made Sukarsa et al., 2020)

Kedua, pada level global, **E-Government Development Index (EGDI) Indonesia** menunjukkan tren peningkatan yang signifikan, yakni dari peringkat 107 pada 2018 menjadi peringkat 64 pada 2024, dengan skor 0,7991 yang menempatkan Indonesia dalam kelompok *Very High EGDI*. Pencapaian ini merefleksikan penguatan layanan daring (*Online Service Index*) dan modal manusia (*Human Capital Index*), meskipun infrastruktur telekomunikasi masih relatif tertinggal dibanding negara-negara ASEAN lainnya. (United Nations Department of Economic and Social Affairs [UN DESA], 2022, 2024)

Namun, capaian di tingkat daerah menunjukkan variasi yang tajam. Beberapa daerah seperti Provinsi Bali berhasil meraih skor tinggi berkat integrasi layanan dan dukungan infrastruktur yang memadai, sementara kabupaten/kota seperti Bangli dan Karangasem menghadapi tantangan dalam mengoptimalkan sistem layanan digital (Anjani et al., 2019). Kota Batu dan Prabumulih mencatat kemajuan pada layanan publik berbasis aplikasi, tetapi masih terkendala pada aspek koordinasi antar-OPD (Maris et al., 2023). Sementara itu, Kota Padang menunjukkan kemajuan terbatas karena keterbatasan SDM dan literasi digital aparatur. (Sumijan & Purnama, 2020)

Dari perspektif teori, **model kematangan e-government** menegaskan bahwa peningkatan indeks tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan aplikasi, melainkan juga oleh **integrasi vertikal–horizontal dan perubahan proses bisnis organisasi**. Menguraikan empat tahap kematangan, yaitu katalog, transaksi, integrasi vertikal, dan integrasi horizontal, dengan penekanan pada pentingnya integrasi sebagai ciri kematangan tinggi ((Layne & Lee, 2001). Menambahkan dimensi nilai publik dengan menekankan pergeseran dari layanan yang bersifat *supply-driven* menuju layanan yang menciptakan *public value* (Andersen & Henriksen, 2006). Menyoroti perlunya dukungan kelembagaan berupa standar, arsitektur data, serta manajemen perubahan dalam mempercepat transisi menuju pemerintahan digital yang matang. (Valdés et al., 2011)

Dengan demikian, implikasi praktis bagi pemerintah daerah adalah perlunya fokus pada **arsitektur SPBE, interoperabilitas data, penguatan kompetensi aparatur, serta investasi infrastruktur TIK yang menutup last-mile gap**. Hal ini selaras dengan arahan kebijakan SPBE nasional dan dapat mempercepat konvergensi capaian daerah menuju kategori *Sangat Baik*. (Kementerian PANRB, 2023, 2024; UN DESA, 2024)

Grafik ini menunjukkan bahwa posisi Indonesia dalam *United Nations E-Government Development Index* (EGDI) meningkat signifikan dari peringkat 107 pada tahun 2018 menjadi 64 pada tahun 2024. Peningkatan 43 peringkat ini menandakan adanya percepatan transformasi digital pemerintahan secara global. Namun, meski peringkat naik, tantangan kesenjangan implementasi antarwilayah di dalam negeri masih tetap ada.

Skor EGDI Indonesia naik dari 0,6612 (2020) menjadi 0,7991 (2024), berpindah dari kategori *High EGDI* ke *Very High EGDI*. Kenaikan skor ini menunjukkan adanya penguatan layanan publik berbasis digital, terutama dari sisi *online services* dan *human capital*. Meski demikian, skor *telecommunication infrastructure* masih relatif tertinggal dibanding negara ASEAN lain, sehingga menjadi catatan penting dalam percepatan e-government.

Indeks SPBE Nasional yang diukur oleh Kementerian PANRB menunjukkan peningkatan dari 2,34 (2022, kategori *Cukup*) menjadi 2,79 (2023, kategori *Baik*). Kenaikan ini memperlihatkan adanya perbaikan kualitas implementasi SPBE di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Namun, capaian ini masih jauh dari level *Sangat Baik* ($\geq 3,50$), sehingga penguatan literasi digital aparatur, integrasi sistem, serta tata kelola menjadi prioritas perbaikan.

Perbedaan ini memperlihatkan bahwa tingkat kematangan e-government di Indonesia belum merata. Daerah dengan dukungan infrastruktur TIK, kapasitas SDM, dan kepemimpinan yang kuat cenderung lebih maju, sedangkan daerah dengan keterbatasan sumber daya masih tertinggal. Hal ini menegaskan bahwa capaian nasional yang meningkat belum sepenuhnya mencerminkan kondisi di level lokal.

Policy Coherence dalam Implementasi E-Government di Daerah

Policy Coherence Vertikal: Implementasi SPBE di daerah sangat dipengaruhi sejauh mana regulasi pusat mampu diinternalisasi (Wulansari & Inayati, 2019). Peraturan Presiden No. 95/2018 dan No. 132/2022 menyediakan kerangka normatif, namun disparitas capaian menunjukkan adanya kesenjangan dalam translasi kebijakan nasional ke praktik lokal (Anggoro et al., 2024). Hal ini menegaskan perlunya konsistensi standar dan monitoring reguler dari pusat (KemenPANRB, 2023).

Policy Coherence Horizontal: Fragmentasi kebijakan di tingkat daerah tercermin dari tumpang tindih aplikasi antar-OPD, resistensi ego sektoral, dan keterbatasan interoperabilitas sistem (Pramuditha et al., 2025). Ketidadaan mekanisme koordinasi antardaerah memperlebar digital divide (Rachmawati & Fitriyanti, 2021). Di sinilah integrasi horizontal diperlukan agar transformasi digital berjalan menyeluruh (Andersen & Henriksen, 2006).

Kajian literatur menegaskan bahwa policy coherence adalah kunci dalam memperkuat implementasi e-government di Indonesia. Koherensi vertikal memastikan kebijakan pusat dapat diterapkan secara konsisten di daerah, sementara koherensi horizontal mendorong kolaborasi lintas sektor dan antardaerah.

Provinsi Bali berhasil mencapai skor SPBE tinggi berkat penerjemahan regulasi pusat yang konsisten (koherensi vertikal) serta integrasi aplikasi lintas-OPD yang kuat (koherensi horizontal) (Pramuditha et al., 2025). Bali juga mengembangkan inovasi layanan terpadu berbasis digital yang menghubungkan pelayanan administrasi kependudukan (Rachmawati & Fitriyanti, 2021), perizinan, dan kesehatan, sehingga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik. Dukungan infrastruktur TIK yang memadai serta kepemimpinan daerah yang visioner turut memperkuat keberhasilan implementasi kebijakan digital. (Mellyana Eka Mardiana, Rizki Aulia Adinda, 2021)

Sebaliknya, Kota Padang masih mencatat capaian SPBE rendah karena lemahnya internalisasi kebijakan pusat dan terbatasnya koordinasi antarunit kerja (Taufik et al., 2023). Beberapa aplikasi daerah berjalan secara parsial tanpa interoperabilitas, sehingga menimbulkan duplikasi dan beban kerja tambahan bagi Masyarakat (Gartika & Widiyanto, 2024). Padang juga menghadapi keterbatasan SDM yang belum memiliki literasi digital memadai, serta infrastruktur jaringan yang belum merata (Astuti et al., 2024). Kondisi ini menggambarkan lemahnya policy coherence baik secara vertikal maupun horizontal.

Perbandingan ini mempertegas bahwa policy coherence merupakan variabel kunci yang membedakan keberhasilan implementasi e-government di tingkat lokal. Daerah dengan koherensi kuat dapat mengoptimalkan kebijakan nasional sekaligus mendorong inovasi lokal, sementara daerah dengan koherensi lemah mengalami stagnasi meskipun memiliki kerangka regulasi yang sama. (Wirawan, 2020)

Upaya Perbaikan dan Rekomendasi Strategis

Hasil kajian literatur menegaskan bahwa upaya perbaikan implementasi e-government di daerah tidak dapat dilepaskan dari aspek policy coherence. Tumpang tindih regulasi, lemahnya sinkronisasi pusat–daerah, dan koordinasi antar-OPD masih menjadi hambatan serius (Sulistyaningsih et al., 2023). Oleh karena itu, diperlukan strategi yang tidak hanya fokus pada teknologi, tetapi juga pada harmonisasi kebijakan lintas-level pemerintahan.

Pertama, peningkatan kapasitas SDM dan literasi digital. Aparatur membutuhkan pelatihan berkelanjutan mengenai teknologi informasi, manajemen data, dan keamanan digital (Renteria et al., 2019). Program ini harus dirancang secara nasional agar terjadi keseragaman standar, namun

implementasinya menyesuaikan kebutuhan daerah. Hal ini mencerminkan policy coherence vertikal antara kebijakan pusat dan praktik daerah.

Kedua, penguatan tata kelola dan integrasi regulasi. Sinkronisasi kebijakan pusat–daerah diperlukan untuk menghindari tumpang tindih regulasi serta mendorong terciptanya standar operasional bersama (Nugraha et al., 2022). Dukungan kepemimpinan kepala daerah terbukti berperan besar dalam keberhasilan koordinasi lintas-OPD. Dengan demikian, policy coherence horizontal antar sektor juga harus diprioritaskan agar transformasi digital berjalan menyeluruh.

Ketiga, pengembangan infrastruktur dan interoperabilitas sistem. Pemerataan jaringan internet, peningkatan kualitas pusat data, serta integrasi aplikasi lintas sektor menjadi prioritas penting (RB, 2023). Studi menunjukkan bahwa daerah dengan dukungan infrastruktur TIK yang memadai lebih cepat mencapai kategori SPBE “baik” (Ardana, 2022; Nugraha, 2023). Integrasi sistem antardaerah dan antar-OPD mencerminkan pentingnya policy coherence horizontal sekaligus mengurangi fragmentasi layanan publik digital. (Dwiyanto, 2021)

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa disparitas capaian SPBE antardaerah tidak hanya dipengaruhi faktor teknis, tetapi juga erat kaitannya dengan dimensi *policy coherence* pusat daerah. Kontribusi utama penelitian ini adalah memperluas literatur e-government lokal dengan memasukkan perspektif sinkronisasi kebijakan sebagai determinan keberhasilan implementasi. Secara praktis, penelitian ini memberikan peta jalan bagi pemerintah pusat dan daerah untuk menyelaraskan regulasi, memperkuat literasi digital, dan mengatasi fragmentasi kelembagaan dalam rangka mempercepat transformasi digital menuju kategori SPBE “Sangat Baik”.

REFERENSI

- Andersen, K. V., & Henriksen, H. Z. (2006). E-government maturity models: Extension of the Layne and Lee model. *Government Information Quarterly*, 23(2), 236–248. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2005.11.008>
- Anggoro, T. S., Purba, G. R. M., & Rahayu, H. (2024). Implementasi E-Government Sebagai Bentuk Perwujudan Era Revolusi Industri 4.0 Kontemporer. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(2), 4521–4535.
- Anjani, R. D., Suprpto, & Herlambang, A. D. (2019). Evaluasi Tingkat Kesiapan Pemerintah Kota Batu Dalam Menerapkan Pemerintahan Berbasis Elektronik (E-Government) Dengan Menggunakan ICT Readiness. *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer*, 3(4), 3123–3130. <http://j-ptiik.ub.ac.id/index.php/j-ptiik/article/view/4883>
- Astuti, I., Yusuf, R. M., Nohong, M., Umar, F., & Sabbar, S. D. (2024). Analysis of e-government implementation and factors affecting employee performance: Case study in Tangerang city government. *Journal of Infrastructure, Policy and Development*, 8(10). <https://doi.org/10.24294/jipd.v8i10.7774>
- Chohan, S. R., Hu, G., Si, W., & Pasha, A. T. (2020a). Synthesizing e-government maturity model: a public value paradigm towards digital Pakistan. *Transforming Government: People, Process and Policy*, 14(3), 495–522. <https://doi.org/10.1108/TG-11-2019-0110>
- Chohan, S. R., Hu, G., Si, W., & Pasha, A. T. (2020b). Synthesizing e-government maturity model: a public value paradigm towards digital Pakistan. *Transforming Government: People, Process and Policy*, 14(3), 495–522. <https://doi.org/10.1108/TG-11-2019-0110>
- Gartika, D., & Widiyanto, A. (2024). How do local governments implement e-government: A case study from Bali Province, Indonesia. *JeDEM - EJournal of EDemocracy and Open Government*, 16(1), 61–88. <https://doi.org/10.29379/jedem.v16i1.898>

- I Made Sukarsa, Ida Bagus Ananda Paramartha, Anak Agung Ketut Agung Cahyawan, Kadek Suar Wibawa, Putu Gede Arya Sumertha Yasa, Ni Made Swasti Wulanyani, & Ni Wayan Wisswani. (2020). Evaluation of E-Government Maturity Models in Sub-District Public Services in Indonesia Using the SPBE Framework. *Jurnal RESTI (Rekayasa Sistem Dan Teknologi Informasi)*, 4(2), 243–253. <https://doi.org/10.29207/resti.v4i2.1825>
- Indrajit, R. E., Zainudin, A., & Rudianto, D. (2004). Electronic Government in Cction. *Yogyakarta: Andi Yogyakarta*, 1–272. <https://www.academia.edu/download/50613264/Preinexus-TeknikSearchingEfektifDuniaPendidikan.pdf>
- Layne, K., & Lee, J. (2001). Developing fully functional E-government: A four stage model. *Government Information Quarterly*, 18(2), 122–136. [https://doi.org/10.1016/S0740-624X\(01\)00066-1](https://doi.org/10.1016/S0740-624X(01)00066-1)
- Maris, N. A., Agustini, E. P., Megawaty, M., & Oktarina, T. (2023). Analisis Kesiapan Pemerintahan Kota Prabumulih Dalam Implementasi E-Government Menggunakan Metode Technology Readiness Index (TRI). *Journal of Information System Research (JOSH)*, 4(3), 947–952. <https://doi.org/10.47065/josh.v4i3.3263>
- Mellyana Eka Mardiana, Rizki Aulia Adinda, dan N. L. I. U. (2021). ANALISIS FAKTOR KEBERHASILAN IMPLEMENTASI E- GOVERNMENT DI BANDUNG, BATAM, DAN SURABAYA. *Jurnal Sosial Dan Sains*, 1, 598–609.
- Nugraha, B. (n.d.). *Tata Kelola di Komunikasi dan Informatika Pemerintah Departemen , Bandung Implementasi Kebijakan E-Government dalam Mewujudkan Smart Governance pada Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintahan Kota Bandung*.
- Nugraha, B., Napiah, H., & Saputra, E. (2021). *Implementation of Executive Information Systems in Decision Making in the Development of Branch Leadership Organizations of IPNU-IPPNU Pretek Central Java*. 3(2), 49–54. <https://doi.org/10.51486/jbo.v3i2.14>
- Nugraha, B., Purnamaningsih, P. E., Wiwin, K., Wismayanti, D., Martiawan, R., Sumiati, I., Maesarini, I. W., Firdausijah, R. T., Kunda, A., Kusnadi, I. H., & Hendrayady, A. (2022). *Budi Nugraha, Teori administrasi, Desember 2022*.
- Nugroho, R. A., & Purbokusumo, Y. (2020). E-Government Readiness: Penilaian Kesiapan Aktor Utama Penerapan E-Government di Indonesia E-Government Readiness: Main Actor Readiness Assessment for E-Government Application in Indonesia. *Juni*, 22(1), 1–17. <http://dx.doi.org/10.33164/iptekkom.22.1.2020.1-17>
- Pramuditha, R., Muhafidin, D., Sumaryana, A., & Susanti, E. (2025). E-Government Implementation and Public Service Quality: Challenges and Opportunities in Indonesian Local Administration. *TEC Empresarial*, 20(2), 61–70. https://revistas.tec-ac.cr/index.php/tec_empresarial/article/view/295/175
- Rachmawati, T., & Fitriyanti, K. D. (2021). Analysis of the E-government initiative at local government level in Bandung City, Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 25(1), 62–80. <https://doi.org/10.22146/JSP.58966>
- RB, K. (2023). Sosialisasi pelaksanaan evaluasi spbe tahun 2023. *Kemenpan RB*.
- Renteria, C., Gil-Garcia, J. R., & Pardo, C. A. (2019). *Toward an Enabler-Based Digital Government Maturity Framework: A Preliminary Proposal Based on Theories of Change*. 408–417. <https://doi.org/10.1145/3326365.3326419>

- Sari, K. D. A., & Winarno, W. A. (2012). Implementasi E-Government System Dalam Upaya Peningkatan Clean And Good Government Di Indonesia. *Jeam*, *XI*(1), 1–19.
- Suci Pratiwi, C. (2020). Implementasi E-Government Pada Situs Web Pemerintah Menuju Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Open Government Di Provinsi Jambi. *Jurnal Khazanah Intelektual*, *2*(1), 109–126. <https://doi.org/10.37250/newkiki.v2i1.18>
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*.
- Sulistyaningsih, T., Purnama, R. A., & Kulsum, U. (2023). Smart City Policy: Strategy and Implementation to Realize Smart Urban Governance in Indonesia. *Journal of Governance and Public Policy*, *10*(2), 105–117. <https://doi.org/10.18196/jgpp.v10i1.13840>
- Sumijan, & Purnama, P. A. W. (2020). Analisis Dan Evaluasi Tingkat Kematangan E-Government pada Information Architecture menggunakan Framework Cobit 5 (Studi Kasus : Pemerintah Daerah Kota Padang). *Seminar Nasional Teknologi Informasi, Komunikasi Dan Industri (SNTIKI)*, *12*(1), 1–10.
- Taufik, Liwaul, & Sartono. (2023). Analisis Faktor Keberhasilan Implementasi Kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Kabupaten Konawe Selatan. *Journal Publicuho*, *6*(2), 507–524. <https://doi.org/10.35817/publicuho.v6i2.134>
- Valdés, G., Solar, M., Astudillo, H., Iribarren, M., Concha, G., & Visconti, M. (2011). Conception, development and implementation of an e-Government maturity model in public agencies. *Government Information Quarterly*, *28*(2), 176–187. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2010.04.007>
- Wirawan, V. (2020). Penerapan E-Government dalam Menyongsong Era Revolusi Industri 4.0 Kontemporer di Indonesia. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, *1*(1), 1–16. <https://doi.org/10.18196/jphk.1101>
- Wulansari, A., & Inayati, I. (2019). Faktor-faktor kematangan implementasi e-government yang berorientasi kepada masyarakat. *Register: Jurnal Ilmiah Teknologi Sistem Informasi*, *5*(1), 24–36. <https://doi.org/10.26594/register.v5i1.1288>